

# PERTANIAN DAN INDUSTRI

Prospek, Strategi, dan Kebijakan  
di Masa Depan

Buku ini pada wujudnya hadir untuk memenuhi areal gelanggang literasi nasional demi terbangunnya keunggulan SDM petani bagi Indonesia maju, sekecil apa pun itu. Inilah makna suprematif yang saya sorongkan dalam penerbitan buku Pak Dr. Ir. H. Sambari Halim Radianto, S.T., M.Si. yang bermula dari disertasi yang telah mendeskripsikan dan menganalisis dimensi pertanian dalam selengkap industri yang kian tidak terbelenggu. Teori-teori pertumbuhan dijelentrehkan dengan bertaut erat konsep *welfare economic* yang menghentak peran sektor pertanian dalam pembangunan serta peran sektor industri dalam pembangunan. Lembaran halaman merambah ke arah konsekuensi otonomi daerah dengan studi kasus peran sektor pertanian dan industri dalam pembangunan di Jawa Timur. Kebijakan strategis diulas dengan kerangka implikatifnya yang berangkat dari dialektika argumentatif yang membedah antara pertumbuhan dan pemerataan. Pemungkasan struktur materi muatan buku ini mengikuti kelaziman sebuah "naskah akademik" dengan merekam problematika yang hendak diberikan jalan keluar berupa kesimpulan dan saran.

Konten dan konteks ini sejatinya menjadi sangat "berbaur" sebagai serpihan permasalahan yang acap kali aktual, karena konfigurasi problematika pertanian dan industri tidak pernah menemui titik final. Benturan dan keharmonisan antara pertanian dan industri akan terus berlangsung dengan sesi-sesi tanda jeda semata, bukan tanda kemandekan selama kehidupan ini belum mencapai batas terakhirnya. Situasi disrupsi tentulah menjalar di sektor pertanian dan industri, khususnya pada lingkaran Revolusi Industri 4.0.

Pertanian berkelanjutan dan membangun industri yang berwawasan lingkungan merupakan kebutuhan dalam setiap era. Industri harus mampu menjadi payung yang mengayomi petani karena pertanian telah memberikan keberlanjutan hidup kaum industriawan. Industri mesti terpanggil memperkaya keragaman produk pertanian, dan bukan sebaliknya mendesak keluar panggung kehidupan. Perjalanan hidup manusia ini sejatinya terbangun dari keajaiban para petani yang tetap istikamah dalam profesi termulia: bertani.

EDITOR: Dr. H. Suparto Wijoyo  
Akademisi Universitas Airlangga



PRENAMEDIA GROUP  
[DIVISI KENCANA]  
Email: pmg@prenadamedia.com  
http://www.prenadamedia.com

BUSINESS & ECONOMICS

ISBN 978-623-236-263-3



9 786232 182813  
Harga P. Jawa Rp88.000,00

PERTANIAN DAN INDUSTRI

Prospek, Strategi, dan  
Kebijakan di Masa Depan

Dr. Ir. H. Sambari Halim Radianto, S.T., M.Si.

# PERTANIAN DAN INDUSTRI

Prospek, Strategi, dan Kebijakan  
di Masa Depan

Dr. Ir. H. Sambari Halim Radianto, S.T., M.Si.

# **PERTANIAN DAN INDUSTRI**

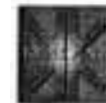
Prospek, Strategi, dan Kebijakan  
di Masa Depan

Dr. Ir. H. Sambari Halim Radianto, S.T., M.Si.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

#### Kutipan Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).



## KATA PENGANTAR

**PERTANIAN DAN INDUSTRI**  
**Prospek, Strategi, dan Kebijakan di Masa Depan**  
Edisi Pertama  
Copyright © 2020

ISBN 978-623-218-281-3  
ISBN (E) 978-623-218-282-0  
15 x 22 cm  
xviii, 284 hlm  
Cetakan ke-1, Januari 2020

Kencana. 2020.1186

**Penulis**  
Dr. Ir. H. Sambari Halim Radianto, S.T., M.Si.

**Editor**  
Dr. H. Suparto Wijoyo

**Desain Sampul**  
Irfan Fahmi

**Penata Letak**  
Y. Rendy/Iam

**Penerbit**  
PRENADAMEDIA GROUP  
(Divisi Kencana)  
Jl. Tambora Raya No. 23 Rawamangun - Jakarta 13220  
Telp: (021) 478-64657 Faks: (021) 475-4134  
e-mail: pmg@prenadamedia.com  
www.prenadamedia.com  
INDONESIA

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit.

ALHAMDULILLAH. Inilah ucapan tanda syukur yang harus saya ketengahkan atas terbitnya buku *Pertanian dan Industri: Prospek, Strategi, dan Kebijakan di Masa Depan*. Sebuah buku yang diangkat dari materi utama disertasi sewaktu saya menempuh pendidikan Doktor Ilmu Ekonomi di Program Pascasarjana Universitas Airlangga. Disertasi itu sendiri telah saya pertahankan dalam Sidang Ujian Terbuka pada tanggal 22 Oktober 2008. Rentang waktu dari 2008-2019 dan awal tahun 2020 ini bukanlah waktu yang singkat melainkan memberikan rekam jejak perubahan segala kebijakan mengenai pertanian dan industri yang semakin progresif, terutama dalam kerangka besar Revolusi Industri 4.0. Penerbitan buku ini pun harus dipahami dalam konstelasi perkembangan permasalahan pertanian di tengah gelombang industrialisasi yang kian massif tetapi tetap berorientasi untuk kesejahteraan petani.

Dalam gerak waktu penulisan disertasi dan terbitnya buku ini pastilah terjadi perubahan-perubahan kebijakan strategis sebagai konsekuensi dinamika zaman maupun keberadaan kepemimpinan nasional dan lokal yang telah bergulir. Dengan demikian, terdapatnya pemaknaan tematik atas data ataupun konsepsi pembangunan dalam merumuskan niatan dasar memakmurkan kaum petani dan mensinergikan dengan kemajuan industri adalah pilihan yang saya tempuh melalui penerbitan buku ini. Dorongan dari berbagai kolega, para akademisi, kaum profesional dan praktisi serta jajaran birokrasi yang pada hakikatnya memberikan ruang agar saya berkenan berbagi

ilmu melalui penerbitan buku ini. Semangat dari para kolega itulah sesungguhnya yang memotivasi dan membuat saya bertekad untuk mempersembahkan buku ini ke khalayak ramai sebagai bagian dari berpartisipasi, bersumbangsih, atau berkontribusi mengolaborasikan antara kepentingan pertanian dan industri.

Dalam kesempatan yang baik ini saya mengucapkan terima kasih kepada para kolega, sejawat dan handai taulan, khususnya kaum akademisi dari Universitas Airlangga serta jajaran birokrasi Kabupaten Gresik yang tiada lelah untuk terus “memprovokasi” agar saya menerbitkan buku ini. Terima kasih yang tidak terhingga saya tujukan secara khusus kepada istri dan anak-anakku yang senantiasa menginspirasi serta menjadikan semua tugas pengabdian di Kabupaten Gresik selama ini harus terus amanah sesuai dengan pesan orang tua saya, yang amat saya muliakan. Buku ini saya persembahkan untuk beliau dan para pengembang ilmu sebagai wujud pengabdian dalam kehidupan. Kepada para pembaca semuanya, saya dengan senang hati untuk menerima masukan, saran, pemikiran, dan kritisi atas materi buku ini demi perbaikan pada edisi-edisi berikutnya. Selamat Tahun Baru 2020 dan semoga Allah Swt. selalu memberkahi kita semua.

Gresik, 1 Januari 2020

Penulis,

**Dr. Ir. H. Sambari Halim Radianto, S.T., M.Si.**

## KATA PENGANTAR EDITOR

### LITERASI PERTANIAN DALAM PUSARAN INDUSTRIALISASI RAMAH LINGKUNGAN

OLEH

**DR. H. SUPARTO WIJOYO**

SEKRETARIS BADAN PERTIMBANGAN FAKULTAS HUKUM, DAN  
KOORDINATOR MAGISTER SAINS HUKUM & PEMBANGUNAN  
SEKOLAH PASCASARJANA, UNIVERSITAS AIRLANGGA

PAK SAM. Demikianlah saya senantiasa memanggilnya seorang sosok yang secara administratif-akademis bernama lengkap Dr. Ir. H. Sambari Halim Radianto, S.T. M.Si. Pada lingkup birokrasi di acara-acara *outbond* yang rileks dalam bentara beriang gembira sambil membarurkan hati para pegawai Pemerintahan Kabupaten Gresik, Pak Sam bolehlah diberi julukan yang meringkaskan namanya dengan sebutan SALIM. Perjalanan hidupnya dapat dibaca sekilas dalam lembar jelang halaman akhir buku ini yang saya yakini, itu hanyalah sedetik deret hayatnya saja. Sebagaimana kisah-kisah pergulatan hidup dari seorang anak yang tumbuh menjemput hari esoknya nan bergulat dengan kepasrahan dalam topangan doa sang ibu yang dipanggilnya Mbok'e, tentu tidak akan cukup terwakili dalam barisan kata yang terangkai dirajutan kalimat-kalimat panjang dalam sebuah catatan kecil di tepian sebuah buku. Apa yang terekam dalam seberkas cerita tentang Pak Sam sebagai anak yang pernah mengalami sekolah tanpa bersepatu, “memanggul barang rombeng” hingga bertengger dalam takhta tertinggi kekuasaan lokal di tlatah Gresik, terasa cukup sudah menjadi pijakan bagi siapa pun untuk tegar dalam mengarungi sejarah yang terbentang. Cerita Pak Sam diniscayakan menggugah

serumpun anak-anak dan orang tua yang terpanggil menyematkan harapan generasi selanjutnya dengan teladan sang bupati Kota Wali.

Saya memahatkan pemahaman bahwa tapak hikayat setiap insan niscaya bersandar pada ketentuan yang tertera dalam kalam takdir melalui ikhtiar-ikhtiar personalnya. Kitab keagamaan memberikan landasan yang terang bahwa setiap kaum akan menjemput prestasinya sesuai dengan perubahan kinerja yang dilakukannya. Tuhan tidak memberikan beban melebihi dari kapasitas yang dimiliki hamba-Nya dengan klausula sistemik bahwa "masa depan penentuan dirinya" tergantung prasangka hamba atas-Ku. Nilai-nilai teologis ini tampak bertaburan dan dirangkum menjadi energi kekuatan bagi Pak Sam dalam meniti tangga kehayatan tanpa pernah lelah, meski merasakan pedih-perih, penat-jengah sejenak sampai pada akhirnya, menggapai gelar akademik tertinggi sebagai seorang Doktor dari Universitas Airlangga.

Doktor yang direngkuh penuh suka duka dan perjuangan yang menggelora di Program Studi Ilmu Ekonomi Universitas Airlangga terpotret memenuhi titik-titik kulminasi "penjelajahan hidupnya" di wilayah Kabupaten Gresik. Ekspresi nalar doktornya itu selaksa menampilkan miniatur pertanian dan perindustrian yang sangat kental dalam dirinya sebagai "penguasa di areal pertanian" yang terangsek oleh industrialisasi. Ruang konstruksi cita dasar kehidupan petani tersekat di horison pemikirannya dan tetap dikukuh sebagai profesi klasik rakyatnya di bintang cakrawala industri yang diformulasikan secara ilmiah. Melalui disertasi doktornya, Pak Sam "menjahit" dengan penuh kesadaran kolektif yang menyejarah secara demografis-ekologis di tataran "keluarga besar petani" Gresik yang dikepung gerakan industrialisasi. Korelasi antara pertanian dan perindustrian di Kabupaten Gresik maupun di Jawa Timur itu lantas memiliki bingkai peramuan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam bincangan saintifik dengan bukti gelar Doktor Ilmu Ekonomi disematkan melalui Ujian Terbuka dengan segala kehormatannya dari Universitas Airlangga.

Buku ini merupakan "gerak historis" disertasi Pak Sam yang dipertahankannya pada 22 Oktober 2008. Lebih dari satu dasawarsa disertasi ini mewarnai lemari pustaka di kampus-kampus maupun sudut-sudut ruang pribadi para penguji yang tidak terakses oleh publik secara luas. Sebagai seorang mitra dialog yang selama ini senantiasa bertukar wicara yang terkadang membentur-benturkan gagasan dan ide-ide solutif bagi kepentingan lingkungan, sekalian pula membuncahkan kehendak agar disertasi itu dicetak menjadi bagian dari gerakan literasi yang memperkaya khazanah dunia pertanian dan industri. Setiap ketemu saya selalu bertanya: *apan disertasi dicetak sebagai buku yang disebarluaskan?* Pertanyaan yang selalu saya ulang itu jelas menimbulkan sikap *grinsingen* ("tergoda dalam desakan") seorang kawan yang tidak menghendaki kristalisasi ilmu itu hanya dipajang dalam kawasan sempit kamar-kamar privat sivitas akademika belaka.

*Alhamdulillah*. Buku ini pada wujudnya hadir jua untuk memenuhi areal gelanggang literasi nasional demi terbangunnya keunggulan SDM petani bagi Indonesia Maju, sekecil apa pun itu. Sebuah kontribusi melalui buku tidak elok dinilai dari besaran gelombang yang dihadirkan di tengah-tengah samudra luas Nusantara. Buku ini dapat saya pahami sebagai bagian dari "embusan angin sumilir" yang nyaris tidak terasa tetapi tetap berkesempatan untuk turut serta menggelombangkan samudera Indonesia, samudera kecintaan bangsa ini atas buku. Untuk itulah membuat buku bukan soal "gelegarnya" tetapi tentang keturutsertaan sebagaimana yang Allah Swt sendiri percontohkan. Bukankah Tuhan mengajarkan manusia dengan ayat-ayat yang amat jelas dapat diamati melalui seluruh narasi produk penciptaan-Nya secara nyata, tetapi tetap terdapat pengajaran yang dikodifikasi dalam wujudnya Kitab Suci. Tuhan menghadirkan Buku Agung bagi manusia dan setiap manusia yang menulis dan membuat buku saya pandang telah terkonfirmasi sebagai hamba yang mengerti atas peran dirinya.

Itulah ikhtiar meski sebesar *zarrah dibelah seribu* dengan membuat

sebuah buku sangatlah berarti untuk menambah derajat bertauhid sambil menenun setiap “benang ilmu” yang Allah Swt. telah berikan. Inilah makna suprematif yang saya sorongkan dalam penerbitan buku Pak Sam yang bermula dari disertasi yang telah mendeskripsikan dan menganalisis dimensi pertanian dalam selang industri yang kian tidak terbandung. Teori-teori pertumbuhan *dijelentrehkan* dengan bertaut erat *konsep welfare economic* yang menghentak *peran sektor pertanian dalam pembangunan serta peran sektor industri dalam pembangunan*. Lembar-lembar halaman merambah ke arah *konsekuensi otonomi daerah* dengan studi kasus *peran sektor pertanian dan industri dalam pembangunan di Jawa Timur*. Kebijakan-kebijakan strategis diulas dengan kerangka implikatifnya yang berangkat dari dialektika argumentatif yang membedah *antara pertumbuhan dan pemerataan*. Pemungkasan struktur materi muatan buku ini mengikuti kelaziman sebuah “naskah akademik” dengan merekam problematika yang hendak diberikan jalan keluar berupa *kesimpulan dan saran*.

Konten buku ini pastilah memberikan pemagaran agar dibaca dalam skala konteks pada saat disertasi ini dipertahankan di tanggal 22 Oktober 2008. Konten dan konteks ini sejatinya menjadi sangat “berbaur” sebagai serpihan-serpihan permasalahan yang acap kali aktual, karena konfigurasi problematika pertanian dan industri tidaklah pernah menemui titik final. Benturan ataupun keharmonisan antara pertanian dan industri akan terus berlangsung dengan sesi-sesi tanda jedah semata, bukan tanda kemandegan selama kehidupan ini belum mencapai batas terakhirnya. Situasi disrupsi tentulah menjalar di sektor pertanian dan industri, khususnya pada lingkaran Revolusi Industri 4.0. Untuk itulah koreksi dan pemutakhiran data bukanlah menjadi arus utama yang dilakukan editor, melainkan terealisasinya hasrat mempersembahkan “bongkahan buku inilah yang dikedepankan”. Jejak hasrat ini dibangun dengan perenungan bahwa menyebarluaskan pergulatan gagasan dari buku ini adalah bagian dari upaya “menjemput pahala” dalam pensifatan karakter *tabligh* yang harus diteladani umat Kanjeng Nabi Muhammad saw.

Melalui pengendapan ruhani demikianlah, penyantunan lampiran berupa kedua undang-undang yang menyentuh sektor pertanian dan industri dapat *diwerdikan* sebagai bentuk legitimasi yuridis atas substansi buku ini. Pertanian berkelanjutan dan membangun industri yang berwawasan lingkungan adalah kebutuhan dalam setiap era. Industri harus mampu menjadi payung yang mengayomi petani karena pertanian telah memberikan keberlanjutan hidup kaum industriawan. Industri musti terpanggil memperkaya keragaman produk pertanian dan bukan sebaliknya mendesak keluar panggung kehidupan. Perjalanan hidup manusia ini sejatinya terbangun dari keajekan-keajekan para petani yang tetap istikamah dalam profesi termulia: bertani.

Setiap butiran nasi yang *istirah* sejenak di piring meja makan sebelum beranjak ke mulut setiap orang pastilah tidak luput dari tangan-tangan kehidupan sang petani. Janganlah main-main dan mempermainkan petani. Para petani sawah maupun petambak saat ini banyak terlintas mengalami derita kerugian yang tidak terperikan. Jerit tangis dan lelehan keringat mereka seolah menjadi banjir bah yang mampu menggulung perjalanan sejarah bangsa melalui tragedi krisis pangan. Mereka menderita bukan saja karena keringnya sawah sewaktu musim kemarau dan banjirnya sewaktu musim penghujan, tetapi kebijakan yang jauh dari rasa keadilan bagi kaum tani. Padi dan palawija serta udang maupun bandeng nyaris serupa nasibnya, sama-sama mengering atau membusuk dan sang petani hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala tanpa bisa mendongak tanda mereka sedang tenggelam dalam pusaran zaman. Waktu panen harga gabah kering giling benar-benar digiling para tengkulak. Gabah basah berharga rendah dan diyakini tidak *nyucuk* dengan biaya yang dikeluarkanya sewaktu menanam.

Di musim panen pun petani terjerat hutang akibat tingginya biaya pemupukan. Pupuk yang dibutuhkan petani terberitakan sering langka dan akhirnya harga membubung tinggi tanpa mampu dibeli petani. Petani tanpa pupuk cenderung duduk *melongo* menonton



sambil harap-harap cemas betapa peliknya jaringan hidup yang dialami. Begitu musim panen tiba mereka juga disentak dengan “ulah pemerintah” yang mendatangkan beras impor. Petani bergulat dengan gilasan roda waktu yang semakin kencang menjeratnya. Pada tahapan inilah kebijakan pertanian harus terus didorong agar berpihak kepada petani. Negara wajib memberikan solusi menjawab pertanyaan sederhana petani: *mengapa harga gabah dan garam ataupun ikan selalu rendah di musin panen?* Apakah pula pupuk yang pabriknya ada di rumah sendiri harus suka-suka menghilang dari pasaran seolah mengajak adu tangkas di permainan obak sodor? Petani benar-benar sedang dipimpong nasibnya oleh kekuatan yang dibidang sebagai kekuatan pasar. Saya menjadi teringat ucapan bahwa suara rakyat memang suara Tuhan, tapi suara pasar adalah suara setan. Begitu diucapkan dan saya menjadi mafhum bahwa nasib petani memang dikilir oleh kekuatan pasar yang menyeruakkan desah kesetanan apabila tidak memberikan perlindungan kepada petani di kubangan industrialisasi.

Oleh karena itulah gerakan *petani mandiri ramah lingkungan* musti difasilitasi. Agenda kerja membuat kompos maupun pupuk cair bagi kepentingan pertanian, sungguh suatu kenyataan yang membanggakan. Petani ada yang berupaya membuat sendiri pupuknya dengan bahan dasar enceng gondok, ayola, bonggol pisang, kotoran ternak serta sebelas jenis bahan lainnya untuk diaduk bak adonan merupakan “tindakan kreatifnya”. Hasilnya tidak hanya menggembirakan dengan produktivitas panen tetapi sembuhnya tanah dari gempuran pupuk kimia yang puluhan tahun diterapkan. Tanah mengeras karena sejak 1972 digelontor pupuk kimia dan pestisida tanpa henti. Kini petani telah berubah dan banyak pemerintahan lokal di Indonesia yang bersedia mengawal perubahan ini dengan pertanian organik yang dimulai dari rakyat. Pemerintah yang berjalan sesuai dengan kebutuhan rakyatnya adalah pemerintahan yang menapaki “jalan” *green century* di abad ke-21 ini. Petani, industri dan pemerintah harus disambung dengan beragam cara agar berubah demi kelestarian

fungsi lingkungan melalui titik balik *back to nature*.

Petani itu sangat *natural*. Dari tanah itulah kehidupan itu bermula dan berakhir. Dari tanah itulah semua berkat Tuhan terukir dengan rekam jejaknya. Terdapat hubungan yang membumi dan melangit di antara para petani yang sadar atas keberadaan *kahuripannya*. Tanah yang diolah dengan cinta kasih yang menggerakkan raga untuk bekerja sebagai tanda pengabdian mutlak diproyeksikan menghasilkan beragam sumber makanan. Dari tanah dengan pancaran airnya itulah disongsong tumbuh semua jenis hal yang dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia. Tanah pun akan memberi keajaiban atas nama Tuhan apabila negara menyematkan kebijakan yang menjadi rahmat bagi bumi. Indonesia dapat memberikan *berkah* pangan melalui tangan terampil warga petani yang selalu *ngramut-ngrumat-ngruwat* (menjaga) lahan-sawah-ladang. Apa yang tidak tumbuh di bumi Pertiwi? Indonesia itu adalah bongkahan surga yang di dalamnya sungai-sungai mengalir jernih serta pepohonanya rindang dengan produk oksigen yang menyegarkan apabila tidak ada industri yang mencemarkan. Syukurilah dengan cara memelihara lingkungan dengan penuh ke-sungguhan cintanya, termasuk melalui bertani tanpa menyakiti bumi ini yang lazim dikumandangkan dengan bahasa *Save Earth*.

Pada lingkup itulah saya mengajak kita semua untuk selalu bersyukur dan bertafakur dengan mengimplementasikan kerja tuntas bagi pengembangan sawah ladang sebagai *jodoh kehidupan*. Pertanian ramah lingkungan yang kini dibahasakan bertani secara organik merupakan pilihan utama untuk menjaga sawah tetap dalam kondisinya yang subur tanpa mencederainya. Pertanian ramah lingkungan adalah “panggilan yang mempesona”, dan soal pilihan itu ternyata sangat menentukan bagaimana kehidupan ke depan ini diarahkan. Memilih bertani ramah lingkungan sangat tepat meski terkadang berat dalam menjalankannya. Buku ini memberikan spirit agar kita terus bertekad, seberat apa pun dan sesulit apa pun jalan yang harus dikembangkan untuk menjaga kesuburan tanah tanpa merusaknya. Mencoba melakukan dan selanjutnya meneguhkan

pendirian bahwa bertani ramah lingkungan itu menguntungkan, sejatinya adalah "tugas pengabdian terindah". Dunia kampus secara paradigmatis bertugas mengawal dan mengomandani sebagai bagian Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam mengharmonisasi "gotong royong pertanian dan industri" yang ramah lingkungan. Kampus turun ke kampung-kampung menemani petani adalah "tapakan kebijakan" yang harus terus didorong. Jangan biarkan petani berjalan sendirian. Kini pemerintah sewajarnya memberikan *roadmap* atas semua yang telah rakyat kerjakan untuk lebih bermakna lagi bagi penyelamatan lingkungan. Membangun dan menggelorakan semangat *go green* adalah dibutuhkan, bukan sekadar diinginkan.

Petani dengan segala pernik hidupnya harus dijadikan profesi yang bermartabat. Bertani tidak boleh dianggap sebagai pekerjaan rendahan dan diolok-olok bahwa petani itu *ndeso* kata anak milenial yang tidak tahu diri. Saatnya generasi milenial bersama petani menata diri dan bangkit lebih mencintai profesi yang paling lekat dalam sesi penciptaan alam semesta. Sejatinya perlu upaya memberi sumbangsih dengan menjaga gairah bertani agar tetap tinggi yang pada saat panen bisa *mesem gemuyu* (tersenyum indah dan mengembang). Daulat pertanian dan daulat pangan memerlukan ketahanan kebijakan yang mengarusutamakan kesejahteraan petani. Ajari petani kembali ke "khittah organik". Sadarilah bahwa pupuk hasil produksi industri yang tidak ramah lingkungan pastilah mempunyai dampak ekologis yang kompleks. Tanah yang banyak dipupuk kimia hanya berkesuburan instan dan pada akhirnya akan kering tanpa "gizi".

Tanpa sawah yang sehat tidak akan muncul produk pertanian yang sehat. Produk pertanian yang sehat hanya lahir dari para petani yang sehat yang kini melakukan *gerakan pertanian organik dan meneguhkan diri sebagai petani ramah lingkungan*. Dalam posisi inilah Pak Sam bersama para pemegang otoritas daerah lainnya bersinergi merekonstruksi konsepsi dan paradigmanya bahwa bertani dan berindustri ramah lingkungan adalah bagian dari sistem pengabdian yang paling bijak dan bijaksana. Bertani dan berindustri

ramah lingkungan merupakan ikhtiar menjaga napas kehidupan ini biar tetap berkelanjutan secara sehat. Sekali jejak untuk bertani dan membangun industri ramah lingkungan diayunkan, pantang surut ke belakang, sampai terteguhkannya kesejahteraan sosial bagi seluruh petani Indonesia terbentang luas. Mengikuti ungkapan lama dari *The World Commission on Environment and Development* (Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan) tahun 1987, buku Pak Sam ini sesungguhnya sedang mengajak untuk mengeja *Our Common Future* (Hari Depan Kita Bersama), khususnya *hari depan petani kita*.

Surabaya, 1 Januari 2020



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
KATA PENGANTAR EDITOR	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
BAB 2 TEORI-TEORI PERTUMBUHAN	23
BAB 3 KONSEP WELFARE ECONOMICS	45
BAB 4 PERAN SEKTOR PERTANIAN DALAM PEMBANGUNAN	51
BAB 5 PERAN SEKTOR INDUSTRI DALAM PEMBANGUNAN	65
BAB 6 KONSEKUENSI OTONOMI DAERAH	73
BAB 7 PERAN SEKTOR PERTANIAN DAN INDUSTRI DALAM PEMBANGUNAN: STUDI KASUS PROVINSI JAWA TIMUR	81
BAB 8 ANTARA PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN: TINJAUAN IMPLIKASI KEBIJAKAN	111
BAB 9 PENUTUP	139
DAFTAR PUSTAKA	143
LAMPIRAN	151
INDEKS	275
TENTANG DR. IR. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.SI.	283

## PENDAHULUAN

---

Ilmu ekonomi pembangunan senantiasa berkembang mengikuti berbagai perubahan fenomena pembangunan yang terjadi di beberapa negara yang sedang membangun perekonomiannya. Strategi dan kebijakan pembangunan pada hakikatnya akan mengikuti perubahan-perubahan terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing negara. Namun dalam hal ini perlu diingat bahwa pembangunan ekonomi tidaklah sama dengan pembangunan masyarakat secara keseluruhan. Pembangunan ekonomi hanyalah salah satu bagian atau salah satu dimensi dari pembangunan secara keseluruhan. Pembangunan secara keseluruhan dalam suatu negara, selain pembangunan ekonomi juga termasuk di dalamnya adalah pembangunan sosial dan politik dalam upaya membangun identitas suatu bangsa. Meskipun demikian, pembangunan sosial, politik, dan ekonomi memiliki keterkaitan yang amat penting. Misalnya, bagaimana pembangunan kultur sosial dan politik dapat memberi kontribusi terhadap pembangunan ekonomi atau, sebaliknya, bagaimana

pembangunan ekonomi dapat memberi sumbangan terhadap pembangunan kultur sosial dan politik. Hal ini jelas menggambarkan bahwa studi antardisiplin sangat dibutuhkan untuk menentukan bagaimana kekuatan-kekuatan ekonomi dan non-ekonomi saling berinteraksi satu sama lainnya.

Selain itu perlu diingat pula ada pendapat yang menyamakan pembangunan ekonomi dengan "kemandirian ekonomi" atau "industrialisasi". Sebagai akibat dari penjajahan dan diperolehnya kebebasan politik kembali, beberapa negara miskin mengekspresikan ketidaksenangan dengan menganggap "kemandirian" adalah sebagai bentuk dari penyediaan pasar-pasar ekspor dari negara-negara miskin di negara kaya dan bantuan modal asing yang diberikan oleh negara maju kepada negara miskin. Untuk itulah bagi beberapa negara miskin "kemandirian" dinilai sebagai dominasi negara asing atau eksploitasi negara asing terhadap negara miskin.

Dalam hal industrialisasi, beberapa negara miskin merasa tidak puas karena mereka merasa hanya menghasilkan barang-barang primer. Industrialisasi cenderung dianggap sebagai upaya yang paling superior. Negara-negara kaya memercayai bahwa mereka kaya karena mereka melakukan industrialisasi. Sebaliknya negara-negara miskin justru memercayai bahwa mereka miskin karena mereka hanya memproduksi barang-barang primer. Apakah masyarakat industri merupakan suatu tujuan yang paling utama bagi suatu negara? Bagaimanapun hal itu bukanlah pertanyaan yang relevan. Bagi negara miskin pembangunan pertanian ataupun pembangunan industri bukanlah masalah yang penting, tetapi lebih dari itu, yang lebih penting lagi adalah bagaimana menempatkan strategi yang tepat untuk mengakselerasi pilihan di antara keduanya dalam kerangka pembangunan suatu negara (Meir, 1970: 6). Dengan demikian, jelaslah bahwa pembangunan ekonomi bukanlah sama dengan industrialisasi.

Pembangunan ekonomi bukanlah dimaksudkan sama dengan industrialisasi karena beberapa alasan: *Pertama*, konsentrasi yang tinggi terhadap produksi dalam sektor primer bukanlah merupakan

penyebab kemiskinan. Kemiskinan itu sendiri lebih banyak disebabkan karena rendahnya produktivitas di sektor pertanian. Besarnya proporsi penduduk yang bekerja di sektor pertanian di negara-negara miskin dengan tingkat produktivitas yang rendah di sektor pertanian, mengakibatkan timbulnya kemiskinan pada sebagian besar masyarakatnya. *Kedua*, kemajuan dalam industrialisasi sangat ditentukan oleh pembangunan sektor pertanian. Tanpa ada dukungan terjaminnya ketersediaan produksi dari sektor pertanian, industrialisasi akan mengalami hambatan. *Ketiga*, pembangunan ekonomi secara sederhana lebih merupakan upaya bagaimana memanfaatkan berbagai kelebihan dari industri-industri. Mungkin hal itu dapat diartikan sebagai sesuatu yang kurang lebih merupakan "kemajuan dari keseluruhan sistem sosial". Atau mungkin hal itu dapat diinterpretasikan sebagai pencapaian beberapa hal yang berhubungan dengan cita-cita modernisasi, misalnya: kenaikan produktivitas; persamaan sosial dan ekonomi; pengetahuan modern; perbaikan dalam kelembagaan dan sikap; serta terciptanya sistem yang terkoordinasi secara rasional dari kebijakan yang terukur yang dapat menghilangkan berbagai hambatan dalam sistem sosial yang terdapat dalam negara-negara yang terbelakang (Meir, 1970: 6).

Pandangan-pandangan tersebut mempunyai implikasi bahwa pembangunan ekonomi adalah sesuatu yang lebih dari sekadar terciptanya pertumbuhan ekonomi saja. Pembangunan dimaksudkan untuk mencapai "pertumbuhan" dan "perubahan". Namun bagaimanapun juga yang dimaksud "perubahan" adalah sesuatu yang berdimensi kualitatif dalam suatu proses pembangunan, yang mungkin saja bisa terjadi tanpa adanya pertumbuhan atau ekspansi perekonomian, di mana dalam proses pembangunan itu terjadi perbaikan dalam kinerja faktor-faktor produksi dan perbaikan dalam teknik produksi, berkembangnya kelembagaan dan terjadinya perubahan dalam sikap dan nilai di masyarakat.

Oleh karena itu, Waterson dalam Mosher (1966: 24) mengartikan pembangunan ekonomi (*development*) sebagai perubahan atau

pertumbuhan, kemajuan atau perkembangan. Pada mulanya pengertian *development* memang sama dengan kemajuan, akan tetapi kemudian diperluas pengertiannya dengan memasukkan unsur bagaimana cara-cara dasar yang ditempuh sehingga mencapai kemajuan itu. Akhirnya sampailah kepada suatu pengertian, bahwa kemajuan yang tengah berlangsung tersebut harus disertai dengan adanya perubahan dan pertumbuhan yang terus-menerus, atau lebih khusus lagi harus disertai dengan terjadinya perubahan-perubahan sosial/struktur sosial dan pertumbuhan ekonomi yang dipercepat. Sejalan dengan pendapat Waterson, Meir (1970: 7) mengartikan pembangunan ekonomi sebagai suatu "proses" di mana pendapatan per kapita riil masyarakat dari suatu negara mengalami kenaikan dalam "jangka waktu panjang".

Kata "proses" ditekankan di sini karena mempunyai implikasi terjadinya interaksi antar kekuatan-kekuatan tertentu dengan berbagai penyebabnya. Dengan demikian, pembangunan adalah suatu proses yang melibatkan hubungan sebab akibat antara berbagai variabel yang terlibat dalam upaya mencapai tujuan-tujuan pembangunan. Oleh karena itu, jika pembangunan tersebut dilaksanakan pada negara miskin, maka pembangunan akan ditujukan untuk menghilangkan adanya kemiskinan massal, dengan target utamanya adalah meningkatkan pendapatan riil masyarakat dan bukan lebih mengutamakan kenaikan dalam pendapatan nasional riil, terlepas dari adanya perubahan dalam jumlah penduduk. Hal ini tersadari bahwa jika lebih mengutamakan kenaikan pada pendapatan nasional riilnya, maka hal itu mungkin saja akan terjadi produksi agregatnya meningkat tapi tanpa disertai dengan perubahan pendapatan per kapita riil dan perbaikan dalam standar hidup dalam masyarakat. Hal itu akan terjadi jika kenaikan dalam pendapatan nasional riil ternyata diikuti oleh kenaikan dalam jumlah penduduk dalam proporsi yang sama atau bahkan lebih besar, sehingga menyebabkan pendapatan per kapita riil masyarakat malah menurun.

Selanjutnya, penekanan pada kata "dalam jangka panjang" dikarenakan hal itu merupakan titik tolak yang sangat penting dari pembangunan, yaitu adanya keberlanjutan peningkatan dalam pendapatan riil masyarakat, bukan kenaikan yang sesaat pada periode kenaikan siklus saja. Oleh karena itu, untuk mencapai keberlanjutan dalam peningkatan pendapatan riil masyarakat, pembangunan haruslah didasarkan atas perencanaan pembangunan yang matang, baik itu rencana jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.

Meskipun kenaikan dalam pendapatan per kapita riil masyarakat diadopsi sebagai tujuan utama, namun hal itu harus disertai dengan tujuan-tujuan lainnya seperti yang diinterpretasikan dalam pembangunan ekonomi, misalnya tercapainya distribusi pendapatan yang merata. Mengecilnya ketimpangan ekonomi secara umum adalah tujuan yang dinyatakan dalam pembangunan ekonomi. Beberapa ahli ekonomi pembangunan mengkualifikasikan tujuan utama pembangunan ekonomi adalah semakin sedikitnya masyarakat yang hidup di bawah garis minimum standar hidup. Ketika muncul dualisme sektor tradisional dan sektor modern, pembangunan ekonomi diharapkan mampu mengeliminasi konflik yang terjadi antara kedua sektor tersebut, sehingga tercapai keselarasan antara sektor tradisional dan sektor modern yang memungkinkan terciptanya peningkatan dan pemerataan pendapatan seluruh masyarakat dalam suasana perekonomian modern.

Tujuan-tujuan lain yang terdapat dalam pembangunan ekonomi adalah mempertahankan dan meningkatkan tingkat minimum konsumsi masyarakat, tingkat pengangguran yang dapat ditoleransi, menghindari disparitas kemajuan dan pertumbuhan antara wilayah dalam suatu negara, diversifikasi perekonomian, dan mencapai harapan-harapan dalam modernisasi.

Dalam hal tujuan kebijakan, maksud dari pembangunan ekonomi sangat bervariasi. Meskipun hal itu hanya indeks kasar, namun kenaikan dalam pendapatan per kapita riil masyarakat masih menjadi indikator yang terbaik untuk mengukur capaian hasil tujuan

utama dari pembangunan ekonomi. Meskipun demikian, indeks dari pembangunan ekonomi yang lain sangat perlu dikembangkan untuk mengukur tujuan-tujuan pembangunan ekonomi yang lain.

Namun indeks kenaikan pendapatan per kapita riil yang dipakai untuk mengukur tingkat pembangunan ekonomi itu masih harus dinilai lagi secara hati-hati, untuk melihat apakah indeks itu digunakan untuk mengukur kemajuan ekonomi ataukah untuk mengukur kenaikan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Jika digunakan untuk mengukur kenaikan kesejahteraan ekonomi masyarakat, maka indeks kenaikan pendapatan per kapita riil adalah belum mencukupi. Kenaikan pendapatan per kapita riil hanya indeks parsial saja dari kesejahteraan ekonomi masyarakat, karena kesejahteraan ekonomi masyarakat harus juga mengandung unsur nilai keadilan yang tecermin dari kondisi distribusi pendapatan dalam masyarakat.

Kesejahteraan ekonomi tidak hanya menekankan pada aspek keadilan distribusinya saja, melainkan juga mempertimbangkan tentang bagaimana komposisi total produksi yang dapat mengakibatkan kenaikan dalam pendapatan per kapita riil masyarakat serta bagaimana produksi ini dinilai. Apakah dengan lebih besar produksi dapat mencukupi kebutuhan masyarakat? Hal itu tergantung dengan seberapa banyak serta apa yang diproduksi dan bagaimana kualitas yang mampu disediakan. Selanjutnya, dalam rangka menilai semua hasil produksi tersebut, maka untuk menghindari subjektivitas dalam penilaian, digunakan pedoman harga pasar. Harga tersebut akhirnya menjadi "timbangan" meskipun akan tetap dipengaruhi oleh distribusi pendapatan. Dengan distribusi pendapatan yang berbeda, harga-harga akan berbeda dan dengan demikian, baik itu komposisi maupun nilai dari produksi nasional juga akan berbeda. Harga pasar juga pada akhirnya akan menjadi terbatas manakala unsur eksternalitas atau biaya sosial diperhitungkan.

Apa yang telah dijelaskan tersebut memperlihatkan berbagai dimensi dari pembangunan ekonomi. Namun bagaimanapun juga yang perlu digarisbawahi kembali adalah bahwa pembangunan ekonomi

mengandung suatu proses perubahan, kemajuan dan perbaikan struktur perekonomiannya, terciptanya pertumbuhan ekonominya serta semakin meningkatnya pendapatan per kapita riil dalam masyarakat yang disertai dengan distribusi pendapatan yang semakin adil agar kesejahteraan ekonomi dalam masyarakat dapat dicapai.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut wajarlah jika perkembangan teori-teori pembangunan ekonomi dan model-model pembangunan yang pertama kali digagas oleh para ahli ekonomi pembangunan generasi pertama pada saat itu adalah dengan memperkenalkan teori dan model strategi pembangunan yang menjelaskan tentang transformasi struktural. Pada waktu itu mereka berpendapat bahwa pembangunan ekonomi merupakan upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan terjadinya transformasi struktural, biasanya dari sektor primer (sektor pertanian) ke sektor sekunder (sektor industri) dan tahap berikutnya dari sektor sekunder ke sektor tersier (sektor jasa). Perdebatan tentang hal ini memang menarik untuk dikaji dalam setiap proses pembangunan ekonomi di setiap negara yang sedang berkembang, termasuk di Indonesia. Tetapi benarkah bahwa pada akhirnya kemajuan suatu bangsa yang dihasilkan dari upaya pembangunan ekonomi akan selalu menafikan keberadaan sektor pertanian, padahal sektor pertanian ini dapat dikatakan merupakan sektor ekonomi yang tertua. Dalam perkembangan sejarahnya, dikatakan bahwa manusia akan berkonsentrasi mengikuti pertanian, yang kemudian pernyataan ini dilengkapi oleh Von Thunen dengan mengatakan bahwa pertanian akan berkonsentrasi di sekitar manusia (Kilkenny, 2004).

Memperhatikan hal tersebut, dapat diketahui bahwa sektor pertanian amat penting dalam setiap aspek kehidupan ekonomi manusia pada waktu itu, baik itu menyangkut ketersediaan kebutuhan pokok manusia maupun menyangkut ketersediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Namun demikian, seiring dengan upaya perbaikan-perbaikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia menuju masyarakat yang lebih maju, di mana upaya ini diyakini sebagai

upaya pembangunan ekonominya, misalnya adanya pembangunan prasarana dan sarana transportasi, perbaikan dalam produktivitas serta kondisi kehidupan di perdesaan tidak mengalami perubahan yang signifikan, tetap saja semakin sulit. Di sisi yang lain kehidupan di perkotaan tampak begitu menjanjikan, sehingga pada akhirnya semua itu secara dramatis mengubah pola hubungan antardaerah (terjadi *demography transition*) yang ditandai dengan semakin meningkatnya urbanisasi dan semakin berkurangnya penduduk di perdesaan. Pada saat yang bersamaan, akibat kemajuan-kemajuan yang diistilahkan sebagai upaya pembangunan ekonomi tersebut, sektor pertanian justru mengalami penurunan peran.

## PEMBANGUNAN DAN DUALISME EKONOMI

Secara sederhana, pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara terus-menerus yang disertai dengan adanya perubahan pada struktur ekonominya (transformasi struktural). Dalam konteks ini, banyak penelitian yang dilakukan oleh para ahli ekonomi pembangunan tentang implementasi dari pembangunan ekonomi di banyak negara. Salah satunya adalah yang dilakukan oleh Kuznet (1971: 349-350) yang meneliti tentang pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur ekonomi pada negara-negara yang melakukan pembangunan ekonominya. Ada dua temuan dari penelitian Kuznet yang menarik untuk dikaji, yaitu:

1. Adanya pergeseran peran sektoral, yakni terjadinya penurunan peran sektor pertanian dan produk-produk primer lainnya seperti pertambangan, kehutanan dan perikanan dan, sebaliknya, terjadi peningkatan peranan sektor industri dan jasa-jasa dalam perekonomian yang sedang mengalami pembangunan ekonominya. Artinya, selama proses pembangunan berjalan, gejala yang terjadi adalah semakin menurunnya kontribusi sektor primer (pertanian, pertambangan, kehutanan serta perikanan) dalam

pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), sedangkan kontribusi sektor sekunder (industri) serta sektor tersier (jasa-jasa) dalam pembentukan PDB semakin meningkat.

2. Awal pertumbuhan ekonomi selalu ditandai dengan meningkatnya akumulasi modal secara fisik (*physical capital accumulations*). Salah satu faktor yang mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi, adalah investasi. Pada awalnya, investasi yang terjadi biasanya berupa modal-modal fisik yang dikenal sebagai "*social overhead capital*" yang sangat dibutuhkan sebagai salah satu prasyarat pembangunan. Mengingat hal itu, wajar jika pada tahap pertumbuhan ekonomi akumulasi modal fisik semakin meningkat.

Hasil penelitian dari Kuznet ini semakin meyakinkan dunia bahwa dalam proses pembangunan ekonomi akan terjadi "*trade-off*" antara pertumbuhan satu sektor dengan sektor yang lain; dalam hal ini yang terjadi adalah kemunduran sektor yang dikenal sebagai sektor tradisional (sektor pertanian) dan sebaliknya terjadi kemajuan pada sektor yang dikenal sebagai sektor modern (sektor industri).

Sebenarnya kalau disimak jauh ke belakang, hasil penelitian Kuznet ini tidak ubahnya sebagai pengujian atas tesis-tesis yang dikemukakan, baik oleh Lewis (1954) maupun Hirschman (1958: 62) yang menyatakan bahwa dalam proses pembangunan ekonomi akan selalu diikuti dengan kemajuan pada sektor modern (sektor industri) dan sebaliknya akan terjadinya penurunan peran dari sektor tradisional (sektor pertanian). Semakin maju pembangunan suatu negara, semakin besar gap yang akan terjadi di antara dua sektor tersebut, yang pada giliran berikutnya akan menciptakan kondisi di mana sektor tradisional dengan berbagai keterbelakangannya hidup berdampingan dengan sektor modern dengan segala kemajuannya. Kondisi ini selanjutnya dikenal sebagai "*dualisme perekonomian*" yang oleh Lewis (1954) dan Hirschman (1958: 62) disebut sebagai "*Model Dualisme Ekonomi*"



Pada dasarnya model dualisme ekonomi dalam pembangunan tersebut selalu berusaha mencari penjelasan yang berkaitan dengan:

- Adanya penurunan peran sektor pertanian dalam suatu perekonomian. Salah satu ciri dari pembangunan adalah ditandai dengan penurunan peranan sektor pertanian, baik dalam hal penggunaan faktor produksi, terutama tenaga kerja maupun modal fisik.
- Adanya akumulasi modal. Tingginya tingkat pertumbuhan yang secara umum disertai dengan tingginya tingkat tabungan dan investasi pada sektor-sektor non-pertanian dalam perekonomian.

Dengan kata lain, model dualisme ekonomi ini pada hakikatnya untuk mengetahui bentuk interaksi antara sektor tradisional (dalam hal ini sektor pertanian) dengan sektor modern (dalam hal ini sektor industri) dalam sebuah proses pembangunan ekonomi.

Lebih lanjut, menurut Lewis (1954) dan Hirschman (1958: 62), model ini mencari penjelasan tentang sebab-sebab pertumbuhan ekonomi dengan penekanan terhadap peran sektor pertanian dan sektor industri dan keterkaitan di antara kedua sektor tersebut. Dualisme perekonomian memandang sektor pertanian sebagai suatu sektor basis bagi kemajuan perekonomian, sebagai pembangkit modal yang diperlukan untuk *take-off* menuju tahap kedua dari pembangunan ekonomi, yaitu industrialisasi. Tetapi apakah memang benar demikian?

Dalam literatur-literatur yang membahas model dualisme ekonomi ini, terdapat dua isu besar yang selalu dikaji, yaitu: *Pertama*, sebagian literatur menolak bahwa sektor pertanian merupakan faktor yang penting dalam mendorong pertumbuhan. *Kedua*, berkaitan dengan itu mereka mengesampingkan mekanisme umpan balik antara sektor pertanian dengan sektor industri. Oleh karena itu, sampai sejauh ini masih terdapat perbedaan pandangan dalam model dualisme ekonomi di antara para peneliti.

Berkaitan dengan hal itu Gopinath et al. (1996) melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa ada hubungan dan interaksi yang

erat antara sektor pertanian dan sektor industri. Mereka menemukan hubungan antara sektor pertanian dengan industri pengolahan makanan. Meningkatnya produktivitas di sektor pertanian akan diikuti dengan semakin murah harga *input* di sektor industri pengolahan makanan. Dan dengan semakin murah harga *input* tersebut, maka permintaannya akan mengalami peningkatan.

Sebaliknya Martin and Mitra (1998) melakukan penelitian terhadap pertumbuhan total produktivitas antara sektor pertanian dan sektor industri dengan menggunakan sampel besar dari banyak negara pada berbagai tingkat pembangunan ekonominya. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa ternyata sektor pertanian lebih produktif dibandingkan sektor industri. Di samping itu, diketahui pula bahwa pertumbuhan produktivitas sektor pertanian lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan produktivitas sektor industri. Hasil ini berlawanan dengan pandangan tradisional yang menyatakan bahwa pertumbuhan produktivitas sektor industri lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan sektor pertanian. Hasil-hasil penelitian yang semacam ini akan sangat berguna sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan kebijakan dan strategi pembangunan yang akan diambil oleh pihak otoritas pembangunan. Sebab jika tidak teliti dan hati-hati akan terjadi kesalahan yang sangat besar jika dilakukan investasi besar-besaran terhadap salah satu sektor yang ternyata "kurang produktif" bagi kehidupan masyarakatnya jika dibandingkan dengan sektor yang lain.

Perdebatan tentang pilihan terhadap pengembangan sektor pertanian ataukah pengembangan sektor industri dalam penetapan strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi juga mewarnai perdebatan otoritas pembuat kebijakan pembangunan di Indonesia saat merancang strategi dan kebijakan pembangunan Indonesia pada Tahun 1970-an, yaitu ketika menyusun dokumen rencana pembangunan lima tahunan yang pertama (REPELITA 1). Dengan memperhatikan hasil-hasil penelitian yang tersedia, pada akhirnya para perancang strategi dan kebijakan pembangunan nasional pada

saat itu mencoba mengakomodasi perbedaan pendapat dengan menetapkan strategi dan kebijakan pembangunan yang menekankan pembangunan sektor pertanian dan sektor industri yang mendukung sektor pertanian. Dengan strategi dan kebijakan pembangunan yang seperti ini, diharapkan *outcome* pembangunan akan berjalan sesuai dengan konsep tahap-tahap pertumbuhan seperti yang dikemukakan oleh Rostow (1960). Hingga tahun 1996, pembangunan ekonomi yang dilaksanakan rezim Orde Baru menunjukkan berbagai keberhasilan yang spektakuler. *Pertama*, pertumbuhan ekonomi, khususnya sektor industri manufaktur sangat tinggi, yaitu rata-rata sekitar 7 persen per tahun selama periode 1968-1996. Pertumbuhan yang demikian tinggi telah berhasil mengangkat posisi Indonesia sebagai salah satu negara industri baru dan disebut pula sebagai negara macan ekonomi Asia (*Asian economic tiger*). *Kedua*, jumlah penduduk miskin absolut menurun tajam dari 54,2 juta orang atau 40,1 persen dari total penduduk pada tahun 1976 menjadi 22,5 juta orang atau 11,4 persen dari total penduduk pada tahun 1996. *Ketiga*, walaupun krisis pangan temporer masih terjadi secara lokal dan sporadis, secara nasional ketahanan pangan cukup mantap. Indonesia telah berhasil meningkatkan produksi beras dengan spektakuler, sehingga statusnya berubah dari negara importir beras terbesar di dunia menjadi negara berswasembada, bahkan eksportir beras. *Keempat*, stabilitas ekonomi cukup mantap, masalah hiper inflasi dan kontraksi ekonomi tidak pernah terjadi lagi. Namun demikian, keberhasilan tersebut ternyata tidak berkelanjutan (*unsustainable*). Pada pertengahan tahun 1997 hingga pertengahan tahun 1999 Indonesia jatuh dalam krisis ekonomi akut yang kemudian berkembang menjadi krisis multi dimensi sosial ekonomi-politik, sehingga rezim Orde Baru sendiri mengalami keruntuhan. Banyak yang menduga salah satu penyebab kondisi tersebut adalah terdapatnya ketidaksesuaian antara konsep-konsep Repelita tersebut dengan implementasi kebijakannya. Realitasnya, sektor industri mendapat porsi yang utama dibandingkan sektor pertanian. Yang terjadi adalah memang pertumbuhan ekonomi selama masa periode pemerintahan

Orde Baru tersebut sangat fantastik. Sektor industri telah menggeser dominasi sektor pertanian dalam pembentukan PDB Indonesia. Tetapi belakangan diketahui bahwa adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta terjadinya perubahan struktur perekonomian Indonesia ternyata tidak diikuti oleh terjadinya realokasi tenaga kerja dari sektor yang mempunyai produktivitas rendah (sektor pertanian) ke sektor yang mempunyai produktivitas tinggi (sektor industri). Dengan kata lain, selama masa pemerintahan Orde Baru tersebut, *outcome* pembangunan ekonominya mengandung sindroma pertumbuhan tanpa transformasi struktural (*growth without structural transformation*), yang mengakibatkan perekonomian dalam kondisi yang rentan dalam menghadapi guncangan-guncangan. Dalam hal ini, terbukti ketika terjadi krisis ekonomi yang menyebabkan kejatuhan pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998 yang kemudian dilakukan reformasi-reformasi secara besar-besaran di berbagai bidang.

Sebagai hasil reformasi pada tahun 1998, sentralisasi yang dominan dengan wewenang pemerintahan utama di tangan pemerintah pusat kini bergeser dengan desentralisasi ke pemerintahan daerah. Hal ini akan menimbulkan beberapa perubahan penting yang merupakan tonggak perubahan dalam strategi dan kebijakan pembangunan bangsa Indonesia dibandingkan dengan masa pemerintahan Orde Baru. *Pertama*, sistem pemerintahan yang dahulunya sentralistik berubah menjadi sistem pemerintahan yang desentralistik dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang 33 Tahun 2004, yang membawa angin segar guna tercapainya otonomi daerah. Otonomi ini berarti memerintah sendiri atau mengandung arti kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. *Kedua*, berkaitan dengan itu, sistem perencanaan pembangunan yang dahulunya *top-down blueprint*, sekarang menjadi *bottom-up learning*. *Ketiga*, pendekatan

pembangunan yang dahulunya mengarah pada pembangunan sektoral, sekarang mengarah pada pendekatan pembangunan regional (wilayah). Perubahan arah dan orientasi pembangunan ini telah menjadi jiwa demi perkembangan masyarakat yang demokratis. Dalam skala birokrasi hal ini telah menjadi mandat dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana otonomi dan partisipasi untuk kesejahteraan masyarakat lokal telah menjadi pilihan kebijakan.

Paradigma pembangunan neo-klasik yang berbasis pada produksi (*production centered development*) dan distribusi (*distributions centered development*) pada akhirnya bergeser menjadi pembangunan yang berbasis pada rakyat (*people centre development*) serta yang berbasis partisipasi rakyat (*based participations development*), yang selanjutnya dikenal dengan strategi dan kebijakan pembangunan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Pada kondisi yang seperti ini, pemerintah daerah akan menjadi ujung tombak dalam setiap implementasi strategi dan kebijakan pembangunan nasional. Artinya keberhasilan dalam implementasi strategi dan kebijakan pembangunan nasional akan sangat ditentukan oleh keberhasilan dalam implementasi strategi dan kebijakan pembangunan daerah. Dengan demikian, jika pada masa sebelum reformasi semua perencanaan ditentukan dari pusat dan pemerintahan di daerah hanya bertindak sebagai operator saja (*top-down blueprint*), maka untuk saat ini pemerintahan di daerah dengan segala otonomi yang dimiliki, di samping sebagai operator pembangunan, juga bertindak sebagai inisiator pembangunan (*bottom-up learning*).

Meskipun semua rencana induk pembangunan ditentukan oleh pemerintah pusat, tetapi pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk menentukan sendiri rencana strategis pembangunannya dengan mengacu pada permasalahan-permasalahan strategis yang dihadapi secara spesifik oleh masing-masing daerah. Implikasi dari semua ini adalah bahwa keberhasilan pembangunan nasional akan sangat dipengaruhi oleh kreativitas dari masing-masing daerah untuk me-

nerjemahkan semua rencana induk pembangunan dari pemerintah pusat yang didasarkan atas permasalahan spesifik masing-masing daerah. Sekarang memasuki era reformasi dan liberasi informasi tentu seluruh proses pembangunan harus partisipatoris dimana masyarakat terlibat aktif sejak perencanaan apalagi sudah berlaku Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, studi ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh sektor pertanian dan industri terhadap keberhasilan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Timur ketika memasuki era otonomi daerah pada periode 2001 sampai dengan 2006. Sejauh ini sebagai implikasi dari penetapan Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu zona pengembangan industri dalam kerangka tata ruang nasional, pengembangan sektor industri di Provinsi Jawa Timur mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Sejak akhir PELITA V Tahun 1993 s.d. 1998 (tahun berakhirnya Pemerintahan Orde Baru) sektor industri merupakan sektor unggulan Provinsi Jawa Timur. Tingkat pertumbuhan sektor industri mencapai rata-rata 5,08% per tahun selama periode tersebut, dibandingkan sektor pertanian yang hanya tumbuh sebesar rata-rata 0,40% per tahun pada periode yang sama. Komposisi sektoral dari produk domestik regional bruto (PDRB) Provinsi Jawa Timur semakin didominasi oleh sektor industri dan sektor perdagangan, hotel dan restoran meninggalkan sektor pertanian. Kontribusi sektor industri yang semula 25,18% pada tahun 1993 semakin meningkat menjadi 27,77% pada akhir tahun 1998. Demikian juga dengan sektor perdagangan, hotel dan restoran yang semula 20,37% pada tahun 1993 menjadi 20,90% pada tahun 1998, dengan tingkat pertumbuhan sektoral rata-rata sebesar 3,16% pada periode 1993 s.d. 1998. Sebaliknya sektor pertanian yang semula kontribusinya terhadap PDRB Provinsi Jawa Timur sebesar 19,67% pada tahun 1993, dan malah mengalami penurunan menjadi 18,09% pada tahun 1998.

Perkembangan sektor industri di Provinsi Jawa Timur selama periode pembangunan sebelum era otonomi daerah tersebut

memberi dampak yang positif terhadap perekonomian Provinsi Jawa Timur. Tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur selama periode tahun 1993 s.d. 1997 yang sempat mencapai 7,17% rata-rata per tahunnya, dan pada waktu terjadi krisis ekonomi tahun 1998 pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan hingga mencapai -16,12%, sehingga tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur selama periode 1993 s.d. 1998 hanya mencapai 2,51% rata-rata per tahun. Dengan kondisi yang seperti itu tingkat pendapatan per kapita masyarakat Provinsi Jawa Timur yang semula sebesar Rp 1.341.443,93 pada tahun 1993 hanya meningkat menjadi sebesar Rp 1.422.134,11 pada tahun 1998.

Meskipun demikian, hasil-hasil ini tidak segera dapat mengindikasikan meningkatnya kesejahteraan masyarakat Provinsi Jawa Timur. Seperti halnya yang terjadi pada level nasional, strategi dan kebijakan pembangunan pada era sebelum otonomi daerah (masa Pemerintahan Orde Baru) menyisakan sejumlah persoalan. Disinyalir terjadi sindroma pertumbuhan tanpa transformasi struktural (*growth without structural transformation*) di Jawa Timur, yang ditunjukkan dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang pesat yang diikuti terjadinya perubahan komposisi sektoral PDRB secara drastis dari dominasi sektor pertanian menjadi dominasi sektor industri, tetapi di lain pihak komposisi tenaga kerja tetap didominasi sektor pertanian yang berakibat titik balik transformasi struktural (*structural transformation turning point*) tidak pernah tercapai. Bahkan setelah era otonomi daerah di mana daerah diberi kebebasan untuk menetapkan sendiri strategi dan kebijakan pembangunannya, arah strategi dan kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Timur belum menunjukkan adanya perubahan yang signifikan. Yang terjadi adalah semakin dominannya sektor industri dan sektor perdagangan, hotel dan restoran yang mengakibatkan kontribusi sektor pertanian semakin tertinggal jauh oleh kedua sektor tersebut.

Selama tahun 2001 sampai dengan 2006, kontribusi sektor industri malah mencapai rata-rata 28,33% dan sektor perdagangan, hotel

dan restoran mencapai rata-rata 27,14%, sebaliknya kontribusi sektor pertanian masih tidak beranjak dari angka 18%—tepatnya 18,44% rata-rata per tahun. Ketika terjadi transformasi struktural seperti yang telah ditunjukkan data dan informasi tersebut, yang tidak disertai dengan mobilitas tenaga kerja antarsektor, maka yang terjadi adalah tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi tetapi tak disertai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakatnya, karena ketimpangan pendapatan dalam masyarakat akan semakin mencolok.

Fenomena ini sebenarnya sangat disadari oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur seperti yang telah dinyatakan dalam dokumen RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 sampai dengan 2008, yaitu: performa kinerja perekonomian Provinsi Jawa Timur sampai saat ini sebenarnya telah menunjukkan adanya transformasi struktural dari sektor primer ke sektor sekunder, namun transformasi struktural ini masih semu dikarenakan belum diikuti oleh mobilitas tenaga kerja dari sektor primer ke sektor sekunder. Sebagai ilustrasi, dominasi kontribusi perekonomian sektor industri yang mencapai 24,62% hanya menyerap 12,19% dari tenaga kerja yang ada, sedangkan sektor pertanian, yang memberikan kontribusi terhadap struktur perekonomian sebesar 16,47% pada tahun yang sama, tenaga kerja yang bekerja di sektor ini mencapai 48,83%. (RPJMD Provinsi Jawa Timur 2006 sampai dengan 2008: 21). Hal ini lebih banyak disebabkan karena terdapatnya faktor penghambat dalam proses transformasi struktural sektor industri dan sektor pertanian di Provinsi Jawa Timur yang bersumber dari masalah ketidaksesuaian faktor *endowment* Provinsi Jawa Timur, di antaranya belum siapnya sumber daya yang dibutuhkan oleh sektor industri di Provinsi Jawa Timur. Rata-rata pendidikan masyarakat di Provinsi Jawa Timur masih relatif rendah. Oleh sebab itu, untuk mencukupi tenaga kerja di sektor industri, penambahan tenaga kerja sebagian besar berasal dari luar Provinsi Jawa Timur. Dalam lingkup Provinsi Jawa Timur proses transformasi struktural antara sektor pertanian dengan sektor industri tidak dapat berlangsung sampai pada era awal tahun 2000-an. Pada saat sekarang

setiap bidang perekonomian senantiasa berakumulasi dengan setiap aspek pembangunan wilayah.

Selain itu secara umum perkembangan industri-industri yang ada di Provinsi Jawa Timur selama ini, dalam kenyataannya, bukanlah jenis-jenis industri yang mempunyai sifat baik dalam hal ini "*backward linkages*" maupun "*forward linkages*" dengan sektor pertanian (kecuali PT Petrokima-Gresik, meskipun produknya diatur dalam tata niaga nasional). Perkembangan industri yang ada di Provinsi Jawa Timur lebih cenderung pada industri-industri berat yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan dan industri yang mempunyai intensitas penggunaan lahan yang besar (misalnya *property*). Hal ini menimbulkan konflik kepentingan dengan sektor pertanian. Bentuk-bentuk konflik ini dapat dilihat dengan adanya banyak kasus petani tambak dengan sektor industri, di mana sektor-sektor industri yang ada ternyata menciptakan pencemaran kepada lahan-lahan petani tambak, di samping semakin berkurangnya lahan-lahan pertanian karena "digusur" untuk lahan industri dan permukiman dalam rangka melayani sektor industri. Lebih dari itu lokasi-lokasi sektor industri yang berdekatan dengan permukiman ternyata memberikan ancaman yang cukup signifikan bagi masyarakat Provinsi Jawa Timur (ingat kasus meledaknya pabrik PT Petrowidada dan kebocoran tabung amonia PT Petrokimia Gresik serta kasus Lapindo di Sidoarjo). Terhadap kondisi ini dengan kesigapan pemerintah daerah serta dukungan masyarakat maka Jawa Timur tetap dapat mengatasi problematika tersebut dengan tetap meningkatnya perekonomiannya secara berkelanjutan.

Selanjutnya keberadaan industri-industri yang hanya berkembang di wilayah pantai utara Provinsi Jawa Timur tidak memberikan kontribusi yang berarti terhadap sebagian besar masyarakat Provinsi Jawa Timur yang hidup di perdesaan dan hidup dari sektor pertanian. Hal ini justru menciptakan perbedaan tingkat kesejahteraan yang semakin mencolok antara masyarakat perkotaan yang bekerja di sektor industri dengan masyarakat perdesaan yang bekerja di sektor pertanian.

Berdasarkan pada kenyataan-kenyataan seperti ini, maka ketika Pemerintah Provinsi Jawa Timur diberi kewenangan untuk menentukan strategi dan kebijakan pembangunan di era otonomi daerah ini, kiranya sangat wajar untuk mempertanyakan kembali apakah strategi dan kebijakan pembangunan pada era otonomi daerah yang masih menekankan pengembangan sektor industri ketimbang sektor pertaniannya sudah tepat guna dan sesuai bagi masyarakat Provinsi Jawa Timur yang sebagian besar penduduknya hidup di perdesaan dan bekerja di sektor pertanian? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka kiranya perlu untuk menguji dan menganalisis bagaimana pengaruh perkembangan sektor pertanian dan sektor industri dalam konteks pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Timur, dan selanjutnya memperbandingkan pertumbuhan produktivitas antara sektor pertanian dan sektor industri di Provinsi Jawa Timur serta peranan sektor pertanian di Provinsi Jawa Timur dalam aspek penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan serta peranannya dalam pembangunan di Provinsi Jawa Timur. Penelitian akan menggunakan alat bantu ukur dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Timur.

Dengan diketahuinya peranan dan pengaruh kedua sektor dalam memengaruhi, keberhasilan pembangunan di Provinsi Jawa Timur serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Timur, maka akan dapat dilakukan evaluasi terhadap pilihan sektor pertanian ataukah sektor industri yang nantinya digunakan sebagai sektor penggerak perekonomian Provinsi Jawa Timur dalam kerangka strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi Provinsi Jawa Timur ke depan. Sebab, kalau memperhatikan seluruh penjelasan di atas, sampai sejauh ini pengaruh pertumbuhan sektor industri di Provinsi Jawa Timur memang telah meningkatkan keberhasilan pembangunan daerah di Provinsi Jawa Timur yang cukup tinggi, tetapi bersamaan dengan itu, daya serap terhadap tenaga kerjanya rendah. Hal itu membawa akibat yang tidak menguntungkan dalam upaya pemerataan pendapatan dalam masyarakat. Di samping itu, pembangunan sektor

industri di Provinsi Jawa Timur selama ini mengakibatkan semakin terdesaknya keberadaan sektor pertanian yang merupakan "mata pencaharian" bagi mayoritas penduduk Provinsi Jawa Timur, sehingga menyebabkan tingkat pendapatan bagi mayoritas penduduk Provinsi Jawa Timur malah menjadi menurun. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa pembangunan sektor industri di Provinsi Jawa Timur selama ini memang telah memengaruhi keberhasilan pembangunan di Provinsi Jawa Timur tetapi belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap meningkatnya kesejahteraan seluruh masyarakat Provinsi Jawa Timur.

Bagaimana dengan pembangunan sektor pertanian? Secara teoretis, tingkat produktivitas sektor pertanian memang harus diakui lebih rendah dibandingkan dengan sektor industri. Oleh karena itu, banyak yang menilai bahwa pengaruh sektor pertanian terhadap keberhasilan pembangunan daerah dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat relatif lebih rendah dibandingkan dengan sektor industri. Tetapi dengan berdasarkan konsep bahwa pembangunan harus memanfaatkan faktor *endowment* yang dimiliki oleh suatu daerah, maka sebaiknya pembangunan di Provinsi Jawa Timur haruslah berbasis pada pembangunan sektor pertanian, karena sebenarnya potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Timur ini adalah di sektor pertanian. Namun demikian, bagaimanapun juga haruslah dilakukan pengkajian yang lebih cermat tentang pengaruh sektor pertanian terhadap keberhasilan pembangunan daerah dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Timur.

Ringkasnya, pengkajian yang akan dipaparkan pada bab-bab selanjutnya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan penting, yakni: a) Apakah pertumbuhan sektor pertanian berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan pembangunan daerah di Provinsi Jawa Timur? b) Apakah pertumbuhan sektor industri berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan pembangunan daerah di Provinsi Jawa Timur? c) Apakah pertumbuhan sektor pertanian berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Ti-

mur? d) Apakah pertumbuhan sektor industri berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Timur? dan e) Apakah keberhasilan pembangunan daerah berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Timur?

Melalui studi penelitian ini diharapkan agar hasil studi ini dapat digunakan sebagai dasar acuan untuk menetapkan strategi kebijakan pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Timur yang akan diputuskan setiap tahunnya dalam kerangka pelaksanaan kepemimpinan daerah. Seperti yang telah dijelaskan di atas, penetapan strategi kebijakan pembangunan dengan menitikberatkan pada prioritas pembangunan sektor industri di Provinsi Jawa Timur kenyataannya belum mampu memberikan hasil yang optimal bagi meningkatnya kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Timur. Dengan membandingkan peran sektor pertanian dan industri nantinya akan dapat diketahui sektor basis yang mana yang dapat dijadikan pijakan bagi penetapan strategi dan kebijakan pembangunan di Provinsi Jawa Timur.

Selain itu, ditinjau dari aspek pengembangan ilmu ekonomi pembangunan, studi ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran kepada pengembangan model dualisme ekonomi terutama dalam aspek implementasinya. Sejak Lewis menulis tentang model dualisme, model ini mendapat tanggapan yang besar dari para ahli ekonomi pembangunan, baik dalam konteks teorinya maupun dalam aspek implementasinya. Model ini secara substansi mempertentangkan peran antara sektor pertanian dan sektor industri dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Berkaitan dengan hal itu, sampai saat ini tidak ada kata sepakat dari para ahli ekonomi pembangunan ekonomi. Sebagian ahli menyatakan bahwa sektor pertanian lebih berperan dalam pembangunan ekonomi dibandingkan sektor industri (*agricultural fundamentalism*). Sebaliknya, sebagian ahli menyatakan bahwa sektor industri lebih berperan dibandingkan dengan sektor pertanian (*industrial fundamentalism*). Dalam konteks Provinsi Jawa Timur, penelitian ini akan menghasilkan sektor mana yang lebih berperan dalam pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa



Timur, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi Provinsi Jawa Timur ke depan.

Dari hasil studi ini nantinya diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pada studi-studi yang sejenis yang akan dilakukan. Hasil penelitian yang akan diperoleh akan mempertegas posisi peranan sektor pertanian dan sektor industri dalam kerangka pembangunan ekonomi Provinsi Jawa Timur sampai saat ini. Berdasarkan kondisi tersebut, hasil ini akan dapat dijadikan pedoman untuk pelaksanaan-pelaksanaan penelitian sejenis pada daerah lain dan bahkan untuk Indonesia.